

**PENYUSUNAN MODEL LAPORAN KEUANGAN ENTITAS MIKRO KECIL
MENENGAH BERDASARKAN SAK EMKM PADA EMKM KONVEKSI**

Nada Aulia Pertiwi

Politeknik Negeri Bandung
auliapertiwinada@gmail.com

Hendi Rohendi

Politeknik Negeri Bandung
hendi.rohendi@polban.ac.id

Setiawan

Politeknik Negeri Bandung
setiawan@polban.ac.id

ABSTRACT

This study aims to know the knowledge of EMKM Convections jeans in Soreang District regarding SAK EMKM, to find out the financial records carried out by EMKM, and to compile a model of EMKM Convection's financial statements that are under SAK EMKM. In data collection, used snowball sampling and data analysis techniques are carried out through the stages of data reduction, evaluating EMKM's knowledge of SAK EMKM, evaluating the suitability of the records carried out by EMKM Convection with applicable standards, namely SAK EMKM, seeing the similarity of activities contained in EMKM convection to create a model suitable for all EMKM convection and compile a model of financial statements for EMKM Convections following SAK EMKM. The results showed that the EMKM Convections in Soreang District still did not know about the existence of SAK EMKM, EMKM actors also still did a simple recording, there was no further record up to the preparation of financial statements. Besides, this study also produced a financial statement model for EMKM convections that were by the SAK EMKM.

Keywords: *Financial statenents, EMKM, SAK EMKM.*

ABSTRAK

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengetahuan EMKM Konveksi jeans di Kecamatan Soreang mengenai SAK EMKM, untuk mengetahui pencatatan keuangan yang dilakukan oleh EMKM, dan untuk menyusun model laporan keuangan EMKM Konveksi yang sesuai dengan SAK EMKM. Pengumpulan data, menggunakan *snowball sampling* dengan teknik analisis yang data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penilaian atas pengetahuan EMKM mengenai SAK EMKM, penilaian atas kesesuaian pencatatan yang dilakukan oleh EMKM Konveksi dengan SAK EMKM, melihat kesamaan aktivitas yang terdapat pada EMKM konveksi untuk dapat dibuat satu model yang cocok untuk semua EMKM konveksi, dan membuat model laporan keuangan untuk EMKM sesuai dengan SAK EMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa EMKM Konveksi di Kecamatan Soreang masih belum mengetahui mengenai adanya SAK EMKM, pelaku EMKM juga masih melakukan pencatatan secara sederhana, belum ada pencatatan lebih lanjut hingga ke penyusunan laporan keuangan. Selain itu, penelitian ini juga menghasilkan model laporan keuangan untuk EMKM konveksi yang sesuai dengan SAK EMKM.

Kata Kunci: Laporan keuangan, EMKM, SAK EMKM.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan SAK ETAP untuk digunakan oleh Entitas Mikro Kecil Menengah (EMKM), Koperasi, serta perusahaan-perusahaan tanpa akuntabilitas publik, namun standar ini dianggap terlalu kompleks untuk digunakan oleh EMKM, sehingga dibutuhkan standar akuntansi yang lebih sederhana. Berdasarkan hal tersebut, IAI menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM), dimana standar ini lebih sederhana bila dibandingkan dengan SAK-ETAP. Pemerintah mengharapkan dengan adanya SAK EMKM ini, para pelaku EMKM dapat menyusun laporan keuangan yang sesuai standar dengan lebih sederhana untuk memudahkan proses bisnis mereka (IAI, 2016).

Jumlah EMKM yang ada di Indonesia mencapai 49 juta dan diperkirakan telah menyerap lebih dari 107 juta tenaga kerja. Hal ini menjadikan EMKM sebagai salah satu sektor yang diandalkan untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat serta berperan strategis dalam mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Karena berdasarkan beberapa kajian dapat diketahui bahwa pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk mengurangi kemiskinan namun secara keseluruhan tidak dapat mengurangi kemiskinan (Wright, 1996; Iman, dkk., 2018). Kontribusi sektor EMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga semakin meningkat dalam lima tahun terakhir di mana Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mencatat adanya kenaikan dari 57,84 persen menjadi 60,34 persen pada tahun 2016 (Kompas Online, 2019). Namun, dibalik perannya yang begitu besar, EMKM masih dihadapkan pada masalah yang berkaitan dengan proses administrasi, yaitu mereka masih belum menerapkan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangannya. Begitu juga pada EMKM yang terdapat di Kabupaten Bandung, terdapat 75 EMKM Konveksi celana *jeans* yang tersebar di Kabupaten Bandung, dari 75 konveksi tersebut. Seluruh EMKM Konveksi ini belum menerapkan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangannya. Sistem pembukuan yang dilakukan oleh pelaku EMKM tersebut masih sangat sederhana dimana hanya mencatat jumlah kas masuk dan kas keluar, barang yang dibeli dan dijual, serta jumlah utang dan piutang, bahkan ada yang hanya mencatat jumlah penjualan perbulan saja tanpa mencatat biaya yang dikeluarkan.

Sementara itu, laporan keuangan memiliki peran penting karena dapat digunakan oleh pemerintah untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan tersebut (Irawan, 2017; Apriliawati dan Setiawan, 2017). Selain itu, perusahaan juga dapat menggunakan laporan keuangan ini untuk proses audit apabila perusahaan sudah mulai berkembang, serta dapat digunakan sebagai syarat pengajuan kredit kepada lembaga perbankan. Melihat pentingnya laporan keuangan, maka laporan keuangan perlu disusun dengan cermat dan terbebas dari bias. Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba untuk melakukan penerapan SAK EMKM pada laporan keuangan entitas-entitas mikro kecil dan menengah seperti Soeka (2017); Warsadi dkk. (2017); Hetika dan Mahmudah (2018); Tatik (2018); Indianty (2019); Uno dkk. (2019).

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menerapkan model penyusunan laporan keuangan EMKM Konveksi *jeans* di Kecamatan Soreang. Selain itu, penelitian ini mencoba menelusuri sejauh mana EMKM paham mengenai SAK EMKM serta bagaimana mereka membuat laporan keuangan usaha mereka.

1.2 Tinjauan Pustaka

1.2.1 Pengertian Entitas Mikro Kecil Menengah

Pengertian entitas mikro kecil dan menengah mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) serta Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008. Penggunaan istilah entitas pada SAK EMKM merujuk pada pengertian bahwa

entitas merupakan satuan yang berwujud dan memiliki keharusan untuk membuat laporan keuangan.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) yang di dalamnya khusus mengatur mengenai penyusunan laporan keuangan EMKM mendefinisikan EMKM itu sendiri dalam SAK EMKM 1.2 (2016), yaitu Entitas mikro, kecil, dan menengah adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidaktidaknya selama dua tahun berturut-turut.

Selain itu, Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 BAB I pasal 1, pengertian entitas mikro, kecil, dan menengah yaitu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha yang memenuhi kriteria usaha kecil.

1.2.2 Kriteria Entitas Mikro Kecil Menengah

Kriteria entitas mikro kecil menengah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 BAB I pasal 1, adalah sebagai berikut:

- (1) Kriteria entitas mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Kriteria entitas kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai Dengan paling banyak Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Kriteria entitas Menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan kriteria EMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja, yaitu sebagai berikut:

- (1) Kriteria entitas mikro adalah memiliki karyawan kurang dari empat orang.
- (2) Kriteria entitas kecil adalah memiliki karyawan sebanyak lima sampai sembilan belas orang.
- (3) Kriteria entitas menengah adalah memiliki karyawan sebanyak dua puluh sampai sembilan puluh sembilan orang.

1.2.3 SAK EMKM

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) sebagai penyusun standar akuntansi keuangan yang diakui di Indonesia, menyadari pentingnya peran Entitas Mikro, Kecil, Menengah (EMKM) dalam memajukan perekonomian bangsa. Oleh karena itu, pada tahun 2009 DSAK IAI menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) sebagai bentuk dukungan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan EMKM di Indonesia.

Seiring perkembangan EMKM, terdapat kebutuhan mengenai standar akuntansi yang lebih sederhana dari SAK umum berbasis IFRS dan SAK ETAP dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia dalam menghasilkan laporan keuangan menggunakan kedua pilar SAK tersebut. Karena itu, DSAK IAI melakukan pengembangan standar akuntansi yang dapat memenuhi kebutuhan EMKM. Kemudian, pada tahun 2016 telah disahkan SAK Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) yang mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2018 sebagai upaya mendukung kemajuan perekonomian Indonesia.

SAK EMKM memuat pengaturan akuntansi yang lebih sederhana dari SAK ETAP karena mengatur transaksi yang umum terjadi dalam EMKM dengan dasar pengukurannya murni menggunakan biaya historis. Biaya historis suatu aset adalah sebesar jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan, sedangkan biaya historis suatu liabilitas adalah sebesar jumlah kas atau setara kas yang diterima atau jumlah kas yang diperkirakan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal. Selain itu, SAK EMKM juga dilengkapi dengan ilustrasi penerapan SAK EMKM sehingga dapat memberikan kemudahan bagi EMKM dalam penerapan SAK EMKM tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa SAK EMKM adalah standar akuntansi keuangan yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia sebagai bentuk dukungan untuk pelaku EMKM di Indonesia agar mereka mampu menyusun laporan keuangan dengan sederhana, sehingga dapat digunakan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan para penggunanya.

1.2.4 Manfaat dan Tujuan SAK EMKM

Berdasarkan SAK EMKM 2.1 (2016) tujuan SAK EMKM adalah membantu EMKM dalam menyusun laporan keuangan untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomik oleh siapapun untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Pengguna tersebut meliputi penyedia sumber daya bagi entitas, seperti kreditor maupun investor. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Untuk mendukung penyusunan laporan keuangan pada EMKM, dibuatlah SAK EMKM. Dimana manfaat dan tujuan dari SAK EMKM menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2016) adalah untuk mengembangkan standar akuntansi yang dapat memenuhi kebutuhan EMKM mengenai ketersediaan standar akuntansi yang lebih sederhana. Selain itu, SAK EMKM dapat menjadi pedoman akuntansi bagi EMKM dalam melakukan usahanya agar dapat memperoleh akses yang lebih luas untuk pembiayaan dari industri perbankan.

1.2.5 Penyajian Laporan Keuangan Menurut SAK EMKM

Dalam SAK EMKM 3.9 (2016) dijelaskan bahwa laporan keuangan minimum EMKM terdiri dari laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi selama periode, dan catatan atas laporan keuangan yang berisi tambahan dan rincian pos-pos tertentu yang relevan. Meskipun SAK EMKM hanya mengatur tiga komponen laporan keuangan, namun tetap diperbolehkan apabila akan menyusun komponen laporan keuangan lainnya seperti laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas, serta laporan lain untuk melengkapi laporan keuangan EMKM tersebut.

2. METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan kualitatif, yaitu dimaksudkan untuk dapat mendalami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Sedangkan dalam menentukan subjek penelitian, teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. Dalam pengumpulan data, teknik yang digunakan adalah *Snowball sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data yang awalnya sedikit namun lama-

lama menjadi besar. *Snowball sampling* ini dilakukan melalui wawancara terhadap pemilik usaha, namun apabila informasi yang didapat masih terasa kurang lengkap, maka akan dilanjutkan dengan mewawancarai bagian lain pada perusahaan disesuaikan dengan struktur organisasi di perusahaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data subjek (*Self-Report Data*) dan jenis data dokumenter (*Documentary Data*). Sedangkan sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer didapat dari hasil wawancara dengan pemilik perusahaan mengenai penyusunan laporan keuangan yang dilakukan perusahaan. Sumber data sekunder didapat dari dalam perusahaan seperti jurnal-jurnal, surat-surat, gambaran umum perusahaan, dan sejarah perusahaan dalam bentuk dokumen.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Perusahaan

Aktivitas yang dilakukan oleh konveksi terdiri dari penerimaan pesanan dari pelanggan, membuat *design* untuk diperlihatkan kepada pemesan, membuat pola pada kain sesuai *design* yang dibuat, melakukan pemotongan kain sesuai pola, menjahit kain menjadi celana, melakukan *finishing*, mengantarkan pesanan kepada pelanggan. Selain melakukan produksi sesuai pesanan, konveksi juga membuat produk sendiri untuk langsung dijual ke pasar. Namun, jumlah produksi mereka tidak banyak.

Penelitian ini dilakukan pada konveksi yang berada di Kabupaten Bandung tepatnya Kecamatan Soreang. Konveksi yang dipilih adalah konveksi yang melakukan produksi dan *makloon* celana *jeans*. Konveksi *makloon* adalah konveksi yang tidak memiliki produk sendiri dan hanya mengerjakan pesanan dari pelanggan, biasanya pelanggan yang memesan *makloon* adalah pabrik-pabrik besar. Sistem kerja *makloon* yaitu pabrik akan melakukan pesanan dengan mengirimkan bahan yang sudah dipotong serta contoh produk, jadi konveksi tidak membeli bahan dan tidak perlu membuat model, hanya tinggal menjahit mengikuti contoh yang ada.

Terdapat ratusan konveksi celana *jeans* yang tersebar di Kabupaten Bandung. Pada survey pra-penelitian, peneliti telah melakukan survey terhadap 75 EMKM konveksi *jeans* yang tersebar di Kabupaten Bandung dan menemukan bahwa konveksi terbagi tiga, yaitu konveksi produksi, konveksi *makloon*, dan konveksi campuran yang melakukan produksi dan *makloon* sekaligus. Dari 75 konveksi tersebut, 15 diantaranya adalah konveksi produksi, 25 adalah konveksi *makloon*, dan 35 diantaranya adalah konveksi produksi dan *makloon* yang terletak di Kecamatan Soreang. Konveksi *makloon* adalah konveksi yang tidak memiliki produk sendiri dan hanya mengerjakan pesanan dari vendor, biasanya vendornya adalah pabrik-pabrik besar. Sistem kerja *makloon* yaitu pabrik akan melakukan pesanan dengan mengirimkan bahan yang sudah dipotong serta satu contoh produk, jadi konveksi tidak perlu membeli bahan dan membuat model, hanya tinggal menjahit mengikuti contoh yang ada.

Berdasarkan hasil pengamatan, peneliti menemukan bahwa pada awalnya sebagian besar EMKM Konveksi di Kabupaten Bandung melakukan produksi celana *jeans* secara pribadi lalu langsung menjualnya ke pasaran. Namun, seiring berjalannya waktu banyak bermunculan merek-merek celana *jeans* yang terkenal sehingga konveksi kecil mulai tersisihkan.

Oleh karena itu, mereka mulai bekerjasama dengan pabrik-pabrik yang memproduksi celana *jeans* dengan merek ternama. Konveksi tersebut mengerjakan pesanan produk yang dimiliki pabrik, atau disebut *makloon*. Sampai saat ini, konveksi-konveksi tersebut masih melakukan produksi secara pribadi, dan menerima *makloon* dari pabrik apabila konveksi sedang tidak berproduksi. Dengan adanya dua aktivitas ini, omzet konveksi menjadi semakin besar. Namun, dengan omzet yang cukup besar tersebut, para pelaku EMKM Konveksi hanya melakukan pencatatan secara sederhana dan tidak ada tindak lanjut dari pencatatan tersebut, yaitu tidak ada penyusunan laporan keuangan.

Berdasarkan hasil survey juga diketahui bahwa dari 75 EMKM Konveksi di Kabupaten Bandung tersebut, semuanya belum menerapkan SAK EMKM bahkan di antara 75 konveksi tersebut tidak ada satu pun yang mengetahui SAK EMKM, mereka sama sekali tidak mengetahui adanya suatu standar penyusunan laporan keuangan untuk EMKM. Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa istilah SAK EMKM adalah satu istilah yang asing untuk para pelaku EMKM. Hal ini karena kurangnya sosialisasi baik dari pemerintah, maupun dari para akademisi mengenai SAK EMKM. Selain itu, pendidikan yang rendah, kurangnya kesadaran dari para pelaku EMKM dan rasa malas untuk mencari tahu hal-hal baru yang dapat mendukung usaha mereka juga menjadi faktor pendukung ketidaktahuan mereka akan adanya SAK EMKM.

Selain itu, kriteria konveksi yang dipilih oleh peneliti adalah konveksi yang termasuk ke dalam entitas kecil, dengan hasil penjualan tahunan minimal Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan maksimal Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah). Peneliti tidak memilih konveksi yang termasuk dalam entitas mikro karena mereka masih terbilang konveksi yang sangat kecil dengan produksi setiap bulannya rata-rata kurang dari 500 potong *jeans* dan masih jarang yang memiliki vendor tetap, sehingga produksi mereka setiap bulan masih belum tetap. Sedangkan, alasan peneliti tidak memilih konveksi yang termasuk entitas menengah adalah karena konveksi yang termasuk ke dalam entitas menengah dengan penjualan tahunan sebesar lebih dari Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan penjualan tahunan maksimal sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) sudah tergolong ke dalam industri garmen dan sudah tidak disebut sebagai konveksi. Sistem pencatatan EMKM Konveksi hanya mengidentifikasi transaksi yang berkaitan dengan penerimaan kas dan pengeluaran kas saja. Ada beberapa konveksi yang mengukur aset usahanya berupa mesin dan persediaan bahan dalam satuan rupiah. Mereka menentukan persediaan bahan dan mesin hanya dengan perkiraan saja, tidak ada pencatatan khusus persediaan maupun perhitungan beban penyusutan.

Sebagian besar pelaku usaha konveksi di Kecamatan Soreang sudah melakukan pencatatan sederhana walaupun catatan tersebut hanya sebatas pengingat dan tidak dilanjutkan pada penyusunan laporan keuangan. Beberapa pelaku usaha konveksi ini sudah melakukan pencatatan harta mereka seperti peralatan dan perlengkapan. Namun, pencatatan ini masih belum sesuai penggolongannya dan tidak disertai dengan penyusutan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada 30 EMKM Konveksi di Kecamatan Soreang, seluruh konveksi tersebut tidak mengetahui mengenai adanya SAK EMKM. Istilah tersebut juga merupakan istilah yang asing bagi para pelaku EMKM tersebut. Para pelaku bisnis konveksi juga masih melakukan pencatatan secara sederhana. Pengelolaan keuangan usaha dikelola sendiri oleh pemilik atau keluarga sebagai pelaku pencatatan. Kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya sistem pencatatan untuk pengelolaan uang usaha, menjadikan para pelaku EMKM belum melakukan pencatatan sebagaimana mestinya. Selain itu, alasan mereka tidak melakukan pencatatan lebih lanjut adalah karena rendahnya tingkat pendidikan, sehingga mereka tidak mengerti bagaimana proses pencatatan yang baik dan benar.

Manfaat informasi keuangan bagi pengguna kurang dapat dipahami secara baik oleh pemilik EMKM. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan di Sri Lanka oleh M.W. Madurapperuma, dkk (2016), bahwa banyaknya EMKM yang tidak melakukan pencatatan akuntansi dikarenakan kurangnya pengetahuan mereka baik mengenai pencatatan, maupun mengenai pentingnya pencatatan tersebut dalam mengukur kinerja usaha mereka. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Uddin, dkk (2017) di Bangladesh, juga menyebutkan bahwa tingkat kesadaran entitas kecil menengah untuk melakukan pencatatan keuangan sangat rendah, karena pengetahuan akuntansi mereka yang juga rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan EMKM mengenai pencatatan laporan keuangan tidak hanya terjadi di Indonesia. Sementara itu, peran EMKM sendiri dalam perekonomian sangat besar baik di Indonesia maupun di luar negeri, seperti di Sri Lanka dan Bangladesh.

3.2. Penyusunan Model Laporan Keuangan

Dalam proses penyusunan laporan keuangan EMKM konveksi ini tidak melalui siklus akuntansi, hal ini karena disesuaikan dengan keadaan di lapangan yang tidak memungkinkan untuk dilakukannya pencatatan melalui siklus akuntansi. Oleh karena itu, untuk mempermudah dalam pencatatan sehari-hari, peneliti akan membuat format buku pembantu untuk akun-akun yang sering terjadi dalam kegiatan konveksi.

Berdasarkan SAK EMKM 3.9 laporan keuangan yang harus dibuat oleh EMKM adalah neraca, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Oleh karena itu, peneliti akan menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM. Namun, karena konveksi adalah perusahaan manufaktur, maka membutuhkan laporan harga pokok produksi. Laporan harga pokok produksi ini dibutuhkan untuk menghitung biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang nantinya akan digunakan dalam menyusun laporan laba rugi. Data-data untuk penyusunan laporan keuangan ini akan diperoleh dari buku pembantu yang akan dibuat secara sederhana untuk membantu memudahkan para pelaku bisnis konveksi yang belum mengerti mengenai penyusunan laporan keuangan.

1. Buku Pembantu

Tujuan pembuatan buku pembantu adalah agar pelaku bisnis konveksi yang belum mengenal pencatatan keuangan sama sekali menjadi paham dengan melihat pencatatan secara sederhana ini. Berikut adalah buku pembantu yang disusun untuk EMKM Konveksi.

1. Buku Kas di Tangan

Buku Kas diselenggarakan untuk mengontrol posisi atau keadaan harta berupa uang kas yang dimiliki.

Tabel 1. Buku Kas di Tangan

BUKU KAS DI TANGAN

Periode: April 2019

Tanggal	Keterangan	Debit (Kas Masuk)	Kredit (Kas Keluar)	Saldo

2. Buku Kas di Bank

Buku kas di bank dibuat untuk perbandingan antara pencatatan keuangan perusahaan dengan buku rekening bank. Hal ini dapat digunakan sebagai *control* terhadap kas perusahaan yang ada di bank. Berikut adalah buku kas di bank untuk EMKM konveksi.

Tabel 2. Buku Kas di Bank

BUKU KAS DI BANK

Periode: April 2019

Tanggal	Keterangan	Debit (Kas Masuk)	Kredit (Kas Keluar)	Saldo

3. Buku Piutang

Catatan piutang penting untuk mengontrol jumlah piutang yang merupakan hak kita kepada debitur (pelanggan). Buku piutang ini dapat digunakan sebagai pengingat

bahwa masih ada pelanggan yang belum membayar utangnya, dan juga dapat melihat catatan sisa piutang yang masih harus ditagih. Berikut adalah buku piutang untuk EMKM konveksi.

Tabel 3. Buku Besar Piutang
BUKU BESAR PIUTANG
Periode: April 2019

Tanggal	Nama Pelanggan	Saldo

Tabel 4. Buku Pembantu Piutang
BUKU PEMBANTU PIUTANG
Nama Debitur/Pelanggan :
Alamat :

Tanggal	Keterangan	Debit (Tambah)	Kredit (Kurang)	Saldo

4. Buku Utang

Catatan utang penting untuk mengontrol utang, agar kita dapat melunasi utang tepat waktu. Berikut adalah buku utang untuk konveksi.

Tabel 5. Buku Besar Utang
BUKU BESAR UTANG
Periode: April 2019

Tanggal	Nama Kreditur/Pemasok	Saldo

Tabel 6. Buku Pembantu Utang
BUKU PEMBANTU UTANG
Nama Kreditur/ Pemasok :
Alamat :

Tanggal	Keterangan	Bukti/Ttd	Debit (Kurang)	Kredit (Tambah)	Saldo

5. Buku Inventaris

Buku ini mencatat atau mendata jenis-jenis barang (harta tetap) yang kita miliki. Berikut adalah buku inventaris asset tetap untuk konveksi.

Tabel 7. Buku Inventaris Asset tetap

BUKU INVENTARIS BARANG

Jenis Barang	Harga Perolehan	Tanggal Perolehan	Taksiran Umur (Masa Manfaat)	Taksiran Penyusutan Per Bulan

6. Buku Persediaan Barang

Buku catatan persediaan digunakan untuk mencatat persediaan barang jadi yang siap untuk dijual.

Tabel 8. Buku Persediaan Barang

BUKU PERSEDIAAN BARANG

Tanggal	Nama Barang	Satuan	Masuk	Keluar	Sisa

7. Buku Catatan Penjualan

Buku Catatan Penjualan mencatat penjualan yang ada dalam perusahaan.

Tabel 9. Buku Catatan Penjualan

Tanggal	Nama Barang	Keterangan Penjualan (Tunai/ Kredit)	Jumlah yang terjual	Total

8. Buku Pembelian

Catatan pembelian dibuat untuk membandingkan antara buku kas dengan buku pembelian, serta dengan jumlah fisik barang yang ada. Berikut adalah format buku pembelian.

Tabel 10. Buku Catatan Pembelian

BUKU PEMBELIAN

Tanggal	Nama Barang	Keterangan Pembelian (Tunai/ Kredit)	Jumlah Pembelian	Harga/satuan	Total

9. Catatan Biaya-Biaya

Catatan Biaya-Biaya mencatat biaya-biaya harian yang berkaitan dengan usaha.

Tabel 11. Buku Catatan Biaya

BUKU CATATAN BIAYA

Periode: April 2019

Tanggal	Keterangan Biaya	Jumlah

2. Harga Pokok Produksi

Walaupun dalam laporan keuangan sendiri tidak ada laporan harga pokok produksi, namun untuk EMKM konveksi perlu dilakukan perhitungan harga pokok produksi untuk mengetahui biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi barang dagangnya. Setelah diperoleh harga pokok produksi, maka dilakukan penyusunan laporan laba rugi. Penyusunan laporan laba rugi berdasarkan atas penjualan dan berbagai macam pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan.

Tabel 12. Model Laporan Harga Pokok Produksi

EMKM Konveksi			
Laporan Harga Pokok Produksi			
Untuk Periode yang Berakhir 30 April 2019			
Bahan Baku:			
Persediaan bahan baku 1 April 2019		Rp	-
Pembelian		Rp	-
		Rp	-
Bahan baku tersedia untuk digunakan		Rp	-
Dikurangi:			
Persediaan Bahan baku 30 April 2019	Rp	-	Rp -
	Rp	-	Rp -
Bahan Baku yang digunakan			Rp -
Biaya Tenaga kerja langsung			Rp -
Biaya Overhead Pabrik:			
Biaya bahan penolong	Rp	-	
Biaya tenaga kerja tidak langsung	Rp	-	
Biaya Penyusutan Bangunan Konveksi	Rp	-	
Biaya Penyusutan Peralatan Konveksi	Rp	-	
Biaya Listrik dan Air Konveksi	Rp	-	
Biaya Pemeliharaan Mesin Konveksi	Rp	-	
Biaya Cuci Kain	Rp	-	
Biaya Perlengkapan Konveksi	Rp	-	Rp -
	Rp	-	Rp -
Total Biaya Produksi			Rp -
Persediaan barang dalam proses 1 april 2019		Rp	-
		Rp	-
Persediaan Barang dalam proses 30 April 2019		Rp	-
Harga Pokok Produksi		Rp	-

3. Laporan Laba Rugi

Pada laporan laba rugi, semua penghasilan dan biaya yang diakui dalam suatu periode akan dihitung. Perhitungan penghasilan dan biaya ini tujuannya adalah untuk mengetahui apakah pada akhir periode perusahaan mengalami keuntungan atau laba, atautkah mengalami kerugian. Berikut adalah model laporan laba rugi untuk EMKM Konveksi.

Tabel 13. Model Laporan Laba Rugi

EMKM Konveksi			
Laporan Laba Rugi			
Untuk Periode yang Berakhir 20xx			
Penjualan Barang	Rp	-	
Potongan Penjualan Barang	Rp	-	
Retur Penjualan Barang	Rp	-	
TOTAL PENDAPATAN		Rp	-
Persediaan Barang Jadi (Awal)	Rp	-	
Harga Pokok Produksi	Rp	-	
Barang Tersedia untuk Dijual	Rp	-	
Persediaan Barang Jadi (Akhir)	Rp	-	
HARGA POKOK PENJUALAN		Rp	-
LABA KOTOR		Rp	-
BIAYA USAHA			
Biaya Administrasi	Rp	-	
Biaya Perlengkapan Kantor	Rp	-	
Biaya Telepon dan Listrik (Kantor)	Rp	-	
Biaya Kebersihan	Rp	-	
JUMLAH BIAYA USAHA		Rp	-
TOTAL LABA BERSIH USAHA		Rp	-
PENDAPATAN DAN BIAYA LAIN-LAIN			
Pendapatan Lain-lain	Rp	-	
Biaya Lain-lain	Rp	-	
TOTAL PENDAPATAN DAN BIAYA LAIN-LAIN		Rp	-
TOTAL LABA BERSIH SEBELUM PAJAK		Rp	-

Berdasarkan perhitungan laba rugi tersebut dapat diketahui keadaan perusahaan diakhir periode apakah laba atau rugi, serta dapat menentukan strategi penjualan seperti apa yang akan diteraokan selanjutnya.

4. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan menyajikan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada akhir periode, dengan adanya informasi ini perusahaan dapat mengetahui keadaan keuangan perusahaan pada akhir periode tersebut. Berikut adalah model laporan posisi keuangan EMKM konveksi.

**Tabel 14. Model Laporan Posisi Keuangan
EMKM Konveksi
Laporan Posisi Keuangan
Per 20xx**

Asset				
Asset Lancar				
Kas di Bank	Rp	-		
Kas di Tangan	Rp	-		
Piutang Usaha	Rp	-		
Perlengkapan Konveksi	Rp	-		
Perlengkapan Kantor	Rp	-		
Persediaan Bahan Baku	Rp	-		
Persediaan Barang dalam Proses	Rp	-		
Persediaan Barang Jadi	Rp	-		
Persediaan Bahan Penolong	Rp	-		
Total Asset Lancar			Rp	-
Asset Tetap				
Tanah		Rp	-	
Bangunan Konveksi	Rp	-		
Ak. Penyusutan Bangunan Konveksi	(Rp	-)	Rp	-
Mesin	Rp	-		
Ak. Penyusutan Mesin	(Rp	-)	Rp	-
Peralatan	Rp	-		
Ak. Penyusutan Peralatan	(Rp	-)	Rp	-
Total Asset Tetap			Rp	-
Total Asset			Rp	-
Liabilitas				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang Dagang	Rp	-		
Utang Cuci Kain	Rp	-		
Total Liabilitas Jangka Pendek			Rp	-
Liabilitas Jangka Panjang				
Utang Bank	Rp	-		
Total Liabilitas Jangka Panjang			Rp	-
Total Liabilitas			Rp	-
Ekuitas				
Modal A	Rp	-		
Modal B	Rp	-		
Modal C	Rp	-		
Total Ekuitas			Rp	-
Total Liabilitas & Ekuitas			Rp	-

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Tabel 15. Model Catatan atas Laporan Keuangan

ENTITAS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31..... 20xx		
1. UMUM		
Entitas didirikan di Jakarta berdasarkan akta Nomor xx tanggal 1 Januari 20x7 yang dibuat dihadapan Notaris, S.H., notaris di Jakarta dan mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.xx 2016 tanggal 31 Januari 2016. Entitas bergerak dalam bidang usaha manufaktur. Entitas memenuhi kriteria sebagai entitas mikro, kecil, dan menengah sesuai UU Nomor 20 Tahun 2008. Entitas berdomisili di Jalan xxx, Jakarta Utara.		
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING		
a. Pernyataan Kepatuhan		
Laporan keuangan disusun menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah.		
b. Dasar Penyusunan		
Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis dan menggunakan asumsi dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah.		
c. Piutang usaha		
Piutang usaha disajikan sebesar jumlah tagihan.		
d. Persediaan		
3. Biaya persediaan bahan baku meliputi biaya pembelian dan biaya angkut pembelian. Biaya konversi meliputi biaya tenaga kerja langsung dan <i>overhead</i> . <i>Overhead</i> tetap dialokasikan ke biaya konversi berdasarkan kapasitas produksi normal. <i>Overhead</i> variabel dialokasikan pada unit produksi berdasarkan penggunaan aktual fasilitas produksi. Entitas menggunakan rumus biaya persediaan rata-rata.		
a. Aset Tetap		
Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehannya jika aset tersebut dimiliki secara hukum oleh entitas. Aset tetap disusutkan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu.		
b. Pengakuan Pendapatan dan Beban		
Pendapatan penjualan diakui ketika tagihan diterbitkan atau pengiriman dilakukan kepada pelanggan. Beban diakui saat terjadi.		
4. KAS		
	<u>20x8</u>	<u>20x7</u>
Kas di Tangan – Rupiah	xx	xx
Kas di bank	xx	xx
5. PIUTANG USAHA		
	<u>20x8</u>	<u>20x7</u>
Toko A	xx	xx
Jumlah	xx	xx
6. UTANG BANK		
Pada tanggal 4 Maret 20x8, Entitas memperoleh pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) dari PT Bank ABC dengan maksimum kredit Rpxxx, suku bunga efektif 11% per tahun dengan jatuh tempo berakhir tanggal 19 April 20X8. Pinjaman dijamin dengan persediaan dan sebidang tanah milik entitas.		
7. SALDO LABA		
Saldo laba merupakan akumulasi selisih penghasilan dan beban, setelah dikurangkan dengan distribusi kepada pemilik.		
8. PENDAPATAN PENJUALAN		
	<u>20x8</u>	<u>20x7</u>
Penjualan	xxx	xxx
Retur penjualan	xxx	xxx
Jumlah	xxx	xxx

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengenai penyusunan laporan keuangan pada EMKM Konveksi di Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, maka dapat disimpulkan bahwa para pelaku bisnis Konveksi di Kabupaten Bandung sama sekali tidak mengetahui mengenai adanya SAK EMKM, bahkan mereka terkesan asing dan belum pernah mendengar istilah tersebut sebelumnya. Oleh karena itu, mereka masih belum menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM. Hal ini karena kurangnya sosialisasi kepada para pelaku EMKM di Kabupaten Bandung khususnya Kecamatan Soreang. Para pelaku bisnis konveksi telah melakukan pencatatan, namun pencatatan tersebut masih sangat sederhana, hanya sebatas pemasukan dan pengeluaran, serta pemeliharaan bon-bon utang. Namun, tidak ada tindak lanjut dari pencatatan tersebut. Penyusunan model laporan keuangan EMKM Konveksi di Kecamatan Soreang diawali dengan memproses transaksi yaitu dengan menyusun neraca saldo, menyusun buku pembantu, menyusun harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Setelah itu, dilanjutkan dengan penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM, yaitu menyusun Laporan Laba Rugi, Laporan Posisi Keuangan, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, berikut ini beberapa saran yang peneliti sampaikan agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan: Pencatatan keuangan dapat lebih dilengkapi dan disempurnakan, pengarsipan dokumen-dokumen bukti transaksi sangat disarankan, agar tidak hilang dan tercecer ketika dokumen diperlukan juga ketika pencatatan dilakukan, serta untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan pengembangan berkaitan dengan komputerisasi akuntansi yang dapat dilakukan menggunakan aplikasi Microsoft Excel, sehingga diharapkan EMKM Konveksi di Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung dapat lebih berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliawati, Y. dan Setiawan, S. (2017). Analisa Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak Pada Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis*, 1(1), 118-126.
- Hetika dan Mahmudah, Nurul. (2018). Penerapan Standar Akuntansi Entitas Mikro Kecil Dan Menengah (Sak Emkm) Dalam Menyusun Laporan Keuangan. *Jurnal Bisnis Terapan*, Volume 02 Nomor 01 (Juni, 2018) 81-104.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2016. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Iman, E. A., Setyowati, D. H., & Setiawan, S. (2018, October). Penurunan Persentase Kemiskinan Sebagai Dampak Kinerja Keuangan Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia. In *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar (Vol. 9, pp. 728-736)*.
- Indianty, P. (2019). Kesiapan Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada UMKM Tenun Ikat di Kota Kediri. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. Vol. 7 No. 1, 155-175.

Irawan, A., Setiawan, S., dan Utami, F. (2017). Analisis Deskriptif atas Kertas Kerja Penyusunan Laporan Keuangan Fiskal oleh Kantor Akuntan Publik “X”. Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi, 9(2), 199-216.

Kompas. (2019). Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia. [Online] tersedia: <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/20/120000469/peran-umkm-dalam-perekonomian-indonesia?page=all>.

Penulis : Arum Sutrisni Putri

Editor : Nibras Nada Nailufar

Soeka, Yuvilius Risci Lieyanto Patamuan. (2017). Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Dan Menengah Pada Usaha Kecil Dan Menengah (Studi Pada Peternakan Ayam Jaya). Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE), Vol. 6, No. 4.

Tatik. (2018). Implementasi SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah) pada Laporan Keuangan UMKM (Studi Kasus pada UMKM XYZ Yogyakarta). Jurnal Ekonomi. Vol. 14 No. 02 Juli 2018: 1-14.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Uno, Moudy Olyvia, Lintje Kalangi, dan Rudy J. Pusung. (2019). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Dan Menengah (SAK EMKM) Pada Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Studi Kasus Pada Rumah Karawo Di Kota Gorontalo). Jurnal EMBA, Vol. 7, No.3, 3877 – 3898.

Warsadi, Ketut Ari, Nyoman Trisna Herawati, dan I Putu Julianto. (2018). Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Usaha Kecil Menengah Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Dan Menengah Pada PT. Mama Jaya. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 8, No. 2.

Wright, R. E. (1996). Standardized poverty measurement. *Journal of Economic Studies*, 3-17.